



BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROVINSI JAMBI

Jl.H.Agus Salim NO.19 Kota Baru Jambi No.Telp.(0741) 41124.Fax.42976

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.3 Sistematika Penulisan catatan atas laporan keuangan	5
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	7
	2.1 Ekonomi Makro	7
	2.2 Kebijakan Keuangan	7
	2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	8
	2.3.1 Indikator Kinerja	9
	2.3.2 Capaian Kinerja	9
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan	11
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.	28
	3.2.1 Pendapatan	28
	3.2.2 Belanja	29
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	31
	4.1 Entitas Akuntansi/entitas Pelaporan keuangan	31
	4.2 Basis Akuntansi	32
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	33
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP	33
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	40
	5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD	40
	5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran	40
	5.1.2 Neraca	58
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	63
BAB VII	PENUTUP	69

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.3 Sistematika Penulisan catatan atas laporan keuangan	5
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	7
	2.1 Ekonomi Makro	7
	2.2 Kebijakan Keuangan	8
	2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD	11
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	11
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan	11
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.	36
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	39
	4.1 Entitas Akuntansi/entitas Pelaporan keuangan	39
	4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	40
	4.3 Basis Pengukuran yang mendasari laporan keuangan	41
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam SAP	41
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	48
	5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD	48
	5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran	48
	5.1.2 Neraca	73
	5.1.3 Laporan Operasional (LO)	78
	5.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	80
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	82
BAB VII	PENUTUP	88

LAMPIRAN

Halaman

P	ernyataan Tanggung Jawab	
N	eraca per 31 Desember 2019	
La	aporan Realisasi Anggaran	
La	aporan Operasional	
La	aporan Perubahan Ekuitas	
R	ekapitulasi Beban Penyusutan Tahun 2019	
В	uku Persediaan Barang	
В	erita Acara Rekonsiliasi Neraca Per 31 Desember 2019	
	DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	
Grafik 3.	Perbandingan Anggaran Belanja Daerah TA.2017	11
Tabel.3.1.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019	16
Tabel 3.2.	Ikhtisar target dan realisasi Pendapatan dan Belanja	35
Tabel.3.2.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2016	22
Tabel.3.2.2	Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi	37

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

习. H. Agus Salim No. 19 Kota Baru Jambi Telp.(0741) 41124, 42170 Fax. (0741) 42976

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi Yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan realisasi anggaran;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Perubahan Ekuitas dan
- (f) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Jambi, 31 Desember 2020 KEPALA BADAN,

H.M.ISKANDAR NASUTION, S.H.M.Si

Pembina Utama Madya NIP.196503311994031006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan OPD Tahun 2020 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca OPD, Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan OPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Neraca OPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan OPD mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan.



Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan adalah:

Penyusunan laporan keuangan BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan OPD bertujuan untuk memberikan informasi mengenai:

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
- b. Jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil
 yang telah dicapai;
- c. Perubahan posisi keuangan OPD selama pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Kinerja Pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi Pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Bagi organisasi Pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah: Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship) dan Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.



Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM)
Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64
Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 26
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

2) Laporan Operasional (LO)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.



4) Neraca.

Neraca Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan.

Pelaporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan Negara.
- 2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3. UU.No.1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4. UU.No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara.
- 5. UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6. UU.No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2013 tentang
 Penerapan Sistem Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan
 Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
- Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem
 Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3 Sistematika Penulisan Laporan Keuangan.

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan umber Daya Manusia Tahun 2020, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Kebijakan Akuntansi

Memuat basis akuntansi, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab III. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan



Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan yang berupa pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas Disamping itu, juga memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan danbelanja.

Bab IV Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan yang harus diungkapkan

Bab V Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2020 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2020.

Arah kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Daerah agar mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dilingkungan kerjanya dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka diharapkan agar Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) mampu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui anggaran kediklatan yang tersedia dalam DPA-APBD / APBD-P Tahun 2020

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mempunyai Visi yaitu "Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, integritas, kompetitif dan profesional".



Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap Visi tersebut, diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi juga berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini terwujud dengan telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Tahun 2020 ini penerimaan asli daerah dari sektor Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha jumlahnya belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran belanja kegiatan.Hal ini disebabkan karena BPSDM Provinsi Jambi bukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan terhadap penerimaan PAD akan tetapi hanya merupakan tugas tambahan.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektifitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan seperangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokokpokok pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Pencapaian Target Kinerja

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, Dalam penerapan basis kas untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut kedalam



belanja langsung dan belanja tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja pegawai dan Belanja barang /jasa serta Belanja Modal.

2.3.1 Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan. Kendatipun untuk indicator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti diklat dan sebagainya sedangkan untuk manfaat diharapkan agar meningkatnya kompetensi aparatur.

2.3.2 Capaian Kinerja

Target pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur Jambi dalam rangka menyelenggarakan sebagaian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengembangan sumberdaya manusia aparatur berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka BPSDM mempunyai fungsi :



- Penyusunan kebijakan teknis,rencana dan Program Pengembangan sumberdaya manusia Provinsi.
- 2. Penyelenggaraan,pengembangan kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 4. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran belanja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD BPSDM Provinsi Jambi tahun anggaran 2020.

- Belanja Langsung, target anggaran tahun 2020 sebesar Rp 7.210.862.120 terealisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 6.930.331.358,- atau 96,11 %.
- Belanja Tak Langsung, target anggaran tahun 2020 sebesar Rp 20.069.443.041,81,- terealisasi sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 19.327.945.660,- atau 96.31 %. Berikut grafik perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Tak Langsung.



Realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.6.930.331.358,- digunakan untuk membiayai pelaksananaan program dan kegiatan di lingkungan BPSDM Provinsi Jambi yang terinci sebagai berikut :



				•
BELANJA LANGSUNG	7.210.862.120,00	6.930.331.358,00	(280.530.762,00)	96,11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.348.848.087,00	2.292.934.542,00	(55.913.545,00)	97,62
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	939.000,00	939.000,00	0,00	100,00
Belanja Paket/Pengiriman	939.000,00	939.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	836.280.483,00	812.782.296,00	(23.498.187,00)	97,19
Belanja Barang dan Jasa	836.280.483,00	812.782.296,00	(23.498.187,00)	97,19
Belanja Jasa Kantor	836.280.483,00	812.782.296,00	(23.498.187,00)	97,19
Belanja Telepon	1.800.000,00	1.518.500,00	(281.500,00)	84,36
Belanja Air	102.567.250,00	80.510.250,00	(22.057.000,00)	78,50
Belanja Listrik	571.913.233,00	570.753.546,00	(1.159.687,00)	99,80
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	466.800.000,00	466.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	466.800.000,00	466.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	466.800.000,00	466.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kebersihan Kantor	466.800.000,00	466.800.000,00	0,00	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.943.500,00	54.943.500,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	54.943.500,00	54.943.500,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Pakai Habis	54.943.500,00	54.943.500,00	0,00	100,00
Belanja Alat Tulis Kantor	54.943.500,00	54.943.500,00	0,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.921.014,00	24.800.625,00	(1.120.389,00)	95,68
Belanja Barang dan Jasa	25.921.014,00	24.800.625,00	(1.120.389,00)	95,68
Belanja Cetak dan Penggandaan	25.921.014,00	24.800.625,00	(1.120.389,00)	95,68
Belanja Cetak	16.467.000,00	15.433.825,00	(1.033.175,00)	93,73
Belanja Penggandaan	9.454.014,00	9.366.800,00	(87.214,00)	99,08
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.335.950,00	23.335.950,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	23.335.950,00	23.335.950,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Pakai Habis	23.335.950,00	23.335.950,00	0,00	100,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.335.950,00	23.335.950,00	0,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	38.066.600,00	37.914.574,00	(152.026,00)	99,60
Belanja Modal	38.066.600,00	37.914.574,00	(152.026,00)	99,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	38.066.600,00	37.914.574,00	(152.026,00)	99,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	38.066.600,00	37.914.574,00	(152.026,00)	99,60



Penyediaan Makanan dan Minuman	65.050.000,00	64.738.444,00	(311.556,00)	99,52
Belanja Barang dan Jasa	65.050.000,00	64.738.444,00	(311.556,00)	99,52
Belanja Makanan dan Minuman	65.050.000,00	64.738.444,00	(311.556,00)	99,52
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	14.965.300,00	(34.700,00)	99,77
Be ^j anja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	14.983.144,00	(16.856,00)	99,89
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.050.000,00	34.790.000,00	(260.000,00)	99,26
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	229.374.800,00	206.248.600,00	(23.126.200,00)	89,92
Belanja Pegawai	219.924.800,00	196.798.600,00	(23.126.200,00)	89,48
Honorarium PNS	219.924.800,00	196.798.600,00	(23.126.200,00)	89,48
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.472.000,00	68.018.000,00	(21.454.000,00)	76,02
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.232.000,00	11.040.000,00	(192.000,00)	98,29
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana	31.218.000,00	30.613.000,00	(605.000,00)	98,06
Honorarium Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengelola	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Penatausahaan Keuangan	56.802.800,00	55.927.600,00	(875.200,00)	98,46
Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	100,00
Keikutsertaan Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan dalam dan luar daerah	355.958.700,00	354.331.553,00	(1.627.147,00)	99,54
Belanja Barang dan Jasa	355.958.700,00	354.331.553,00	(1.627.147,00)	99,54
Belanja Perjalanan Dinas	355.958.700,00	354.331.553,00	(1.627.147,00)	99,54
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.958.700,00	155.560.617,00	(398.083,00)	99,74
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	198.770.936,00	(1.229.064,00)	99,39
Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	44.405.000,00	38.350.000,00	(6.055.000,00)	86,36
Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	34.405.000,00	28.350.000,00	(6.055.000,00)	82,40
Belanja Bahan Pakai Habis	17.155.000,00	11.450.000,00	(5.705.000,00)	66,74
Belanja Publikasi	17.155.000,00	11.450.000,00	(5.705.000,00)	66,74
Belanja Jasa Kantor	17.250.000,00	16.900.000,00	(350.000,00)	97,97
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.750.000,00	4.400.000,00	(350.000,00)	92,63
Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00



Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	206.423.040,00	206.400.000,00	(23.040,00)	99,99
Belanja Pegawai	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	194.400.000,00	194.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	12.023.040,00	12.000.000,00	(23.040,00)	99,81
Belanja Pakaian Kerja	12.023.040,00	12.000.000,00	(23.040,00)	99,81
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.023.040,00	12.000.000,00	(23.040,00)	99,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.117.077.965,00	1.103.551.024,00	(13.526.941,00)	98,79
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	394.335.668,00	384.131.834,00	(10.203.834,00)	97,41
Belanja Barang dan Jasa	50.338.548,00	50.333.464,00	(5.084,00)	99,99
Belanja Bahan Pakai Habis	50.338.548,00	50.333.464,00	(5.084,00)	99,99
Belanja alat rumah tangga pakai habis	50.338.548,00	50.333.464,00	(5.084,00)	99,99
Belanja Modal	343.997.120,00	333.798.370,00	(10.198.750,00)	97,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	29.920.000,00	(80.000,00)	99,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	29.920.000,00	(80.000,00)	99,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	80.000.000,00	79.700.000,00	(300.000,00)	99,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	45.000.000,00	44.700.000,00	(300.000,00)	99,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	233.997.120,00	224.178.370,00	(9.818.750,00)	95,80
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	193.997.120,00	184.382.120,00	(9.615.000,00)	95,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	30.000.000,00	29.796.250,00	(203.750,00)	99,32
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	75.000.000,00	74.560.000,00	(440.000,00)	99,41
Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.560.000,00	(440.000,00)	99,41
Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	74.560.000,00	(440.000,00)	99,41
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.560.000,00	(440.000,00)	99,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	201.857.797,00	200.980.097,00	(877.700,00)	99,57
Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	185.657.797,00	184.780.097,00	(877.700,00)	99,53
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	185.657.797,00	184.780.097,00	(877.700,00)	99,53



Belanja Jasa Service	46.560.997,00	46.560.997,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	123.796.800,00	123.796.800,00	0,00	100,00
Dan Pelumas Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.300.000,00	14.422.300,00	(877.700,00)	94,26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	245.996.500,00	244.601.093,00	(1.395.407,00)	99,43
Belanja Pegawai	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	100,00
Honorarium Non PNS	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	100,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	145.800.000,00	145.800.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	100.196.500,00	98.801.093,00	(1.395.407,00)	98,61
Belanja Pemeliharaan	100.196.500,00	98.801.093,00	(1.395.407,00)	98,61
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100.196.500,00	98.801.093,00	(1.395.407,00)	98,61
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	199.888.000,00	199.278.000,00	(610.000,00)	99,69
Belanja Modal	199.888.000,00	199.278.000,00	(610.000,00)	99,69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat	199.888.000,00	199.278.000,00	(610.000,00)	99,69
Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	199.888.000,00	199.278.000,00	(610.000,00)	99,69
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Manajemen Layanan Pengembangan SDM	586.361.578,00	576.327.271,00	(10.034.307,00)	98,29
Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	230.690.000,00	229.452.071,00	(1.237.929,00)	99,46
Belanja Barang dan Jasa	230.690.000,00	229.452.071,00	(1.237.929,00)	99,46
Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Iuran	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.312.000,00	4.287.000,00	(25.000,00)	99,42
Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	2.312.000,00	2.287.000,00	(25.000,00)	98,92
Belanja Perjalanan Dinas	167.238.000,00	166.099.071,00	(1.138.929,00)	99,32
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.675.000,00	38.300.000,00	(375.000,00)	99,03
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.563.000,00	127.799.071,00	(763.929,00)	99,41
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	49.440.000,00	49.366.000,00	(74.000,00)	99,85
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49.440.000,00	49.366.000,00	(74.000,00)	99,85
Belanja Jasa Tenaga	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	100,00



Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	60.484.176,00	60.299.500,00	(184.676,00)	99,69
Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
Honorarium Operator LPPK dan TEPRA	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	48.484.176,00	48.299.500,00	(184.676,00)	99,62
Belanja Cetak dan Penggandaan	12.789.176,00	12.604.500,00	(184.676,00)	98,56
Belanja Cetak	9.155.926,00	9.005.000,00	(150.926,00)	98,35
Belanja Penggandaan	3.633.250,00	3.599.500,00	(33.750,00)	99,07
Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja makanan dan minuman Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	35.695.000,00	35.695.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.695.000,00	35.695.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	92.466.600,00	87.466.600,00	(5.000.000,00)	94,59
Belanja Barang dan Jasa	92.466.600,00	87.466.600,00	(5.000.000,00)	94,59
Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Seminar Kit	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	35.450.000,00	30.450.000,00	(5.000.000,00)	85,90
Belanja Makanan Dan Minuman	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
Tamu Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	85,71
Belanja Perjalanan Dinas	32.566.600,00	32.566.600,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.566.600,00	32.566.600,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	100,00
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	116.769.802,00	114.058.100,00	(2.711.702,00)	97,68
Belanja Barang dan Jasa	116.769.802,00	114.058.100,00	(2.711.702,00)	97,68
Belanja Cetak dan Penggandaan	510.750,00	0,00	(510.750,00)	0,00
Belanja Penggandaan	510.750,00	0,00	(510.750,00)	0,00



Delevie Devieleven Diver	116 250 052 00	114 050 100 00	(2.200.052.00)	00.11
Belanja Perjalanan Dinas	116.259.052,00	114.058.100,00	(2.200.952,00)	98,11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.863.752,00	80.802.800,00	(1.060.952,00)	98,70
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.395.300,00	33.255.300,00	(1.140.000,00)	96,69
Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah Pengembangan SDM Aparatur	85.951.000,00	85.051.000,00	(900.000,00)	98,95
Belanja Barang dan Jasa	85.951.000,00	85.051.000,00	(900.000,00)	98,95
Belanja Cetak dan Penggandaan	44.201.000,00	44.201.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	201.000,00	201.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	85,00
Belanja makanan dan minuman Sosialisasi	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	85,00
Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	100,00
Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	588.287.545,00	518.636.674,00	(69.650.871,00)	88,16
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	331.887.771,00	280.070.058,00	(51.817.713,00)	84,39
Belanja Barang dan Jasa	331.887.771,00	280.070.058,00	(51.817.713,00)	84,39
Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	15.123.471,00	14.831.763,00	(291.708,00)	98,07
Belanja Seminar Kit	15.123.471,00	14.831.763,00	(291.708,00)	98,07
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.166.000,00	4.166.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak	3.244.000,00	3.244.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	922.000,00	922.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	79.655.000,00	70.020.000,00	(9.635.000,00)	87,90
Belanja Makanan Dan Minuman	3.735.000,00	2.895.000,00	(840.000,00)	77,51
Tamu Belanja makanan dan minuman pelatihan	75.920.000,00	67.125.000,00	(8.795.000,00)	88,42
Belanja Perjalanan Dinas	113.903.300,00	113.882.295,00	(21.005,00)	99,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.994.700,00	8.994.700,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.908.600,00	104.887.595,00	(21.005,00)	99,98
Belanja Jasa Tenaga	117.885.000,00	76.015.000,00	(41.870.000,00)	64,48
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	117.885.000,00	76.015.000,00	(41.870.000,00)	64,48
Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	102.848.689,00	100.077.781,00	(2.770.908,00)	97,31
Belanja Barang dan Jasa	102.848.689,00	100.077.781,00	(2.770.908,00)	97,31
Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00



Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00
Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Seminar Kit	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0,00
Belanja Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Penggandaan	950.000,00	0,00	(950.000,00)	0,00
Belanja Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan Dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00
Tamu Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	99.648.689,00	98.427.781,00	(1.220.908,00)	98,77
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	19.500.000,00	19.042.800,00	(457.200,00)	97,66
Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.148.689,00	79.384.981,00	(763.708,00)	99,05
Belanja Jasa Tenaga	0,00	0,00	0,00	0,00
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
Belanja Transportasi Peserta	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00
Belanja Akomodasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	153.551.085,00	138.488.835,00	(15.062.250,00)	90,19
Belanja Barang dan Jasa	153.551.085,00	138.488.835,00	(15.062.250,00)	90,19
Belanja Bahan Pakai Habis	2.593.600,00	2.593.600,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	1.293.600,00	1.293.600,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	9.936.585,00	9.936.585,00	0,00	100,00
Belanja Seminar Kit	9.936.585,00	9.936.585,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	14.128.000,00	8.947.750,00	(5.180.250,00)	63,33
Belanja Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	12.578.000,00	7.397.750,00	(5.180.250,00)	58,81
Belanja Sewa	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	31.425.000,00	30.325.000,00	(1.100.000,00)	96,50
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	28.725.000,00	27.625.000,00	(1.100.000,00)	96,17
Belanja Perjalanan Dinas	74.147.900,00	65.365.900,00	(8.782.000,00)	88,16
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	32.723.900,00	32.691.100,00	(32.800,00)	99,90



Daerah				
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.424.000,00	32.674.800,00	(8.749.200,00)	78,88
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	21.320.000,00	21.320.000,00	0,00	100,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Kompetensi Urusan Pemerintahan Konkuren dan Teknis Inti	570.853.897,00	523.224.187,00	(47.629.710,00)	91,66
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	69.543.434,00	58.998.314,00	(10.545.120,00)	84,84
Belanja Barang dan Jasa	69.543.434,00	58.998.314,00	(10.545.120,00)	84,84
Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.940,00	1.228.920,00	(97.020,00)	92,68
Belanja Dokumentasi	679.140,00	582.120,00	(97.020,00)	85,71
Belanja Dekorasi	646.800,00	646.800,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	3.047.134,00	3.047.134,00	0,00	100,00
Belanja Seminar Kit	530.334,00	530.334,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	2.516.800,00	2.516.800,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.965.360,00	3.947.860,00	(17.500,00)	99,56
Belanja Cetak	1.465.360,00	1.465.360,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	2.500.000,00	2.482.500,00	(17.500,00)	99,30
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	32.130.000,00	27.450.000,00	(4.680.000,00)	85,43
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	31.680.000,00	27.000.000,00	(4.680.000,00)	85,23
Belanja Perjalanan Dinas	12.025.000,00	6.274.400,00	(5.750.600,00)	52,18
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.025.000,00	6.274.400,00	(5.750.600,00)	52,18
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	17.050.000,00	17.050.000,00	0,00	100,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Transportasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Akomodasi Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	154.897.583,00	146.205.393,00	(8.692.190,00)	94,39
Belanja Barang dan Jasa	154.897.583,00	146.205.393,00	(8.692.190,00)	94,39
Belanja Bahan Pakai Habis	3.092.940,00	3.060.600,00	(32.340,00)	98,95



				-
Belanja Dokumentasi	1.799.340,00	1.767.000,00	(32.340,00)	98,20
Belanja Dekorasi	1.293.600,00	1.293.600,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	5.026.433,00	5.026.433,00	0,00	100,00
Belanja Seminar Kit	5.026.433,00	5.026.433,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.653.610,00	11.611.360,00	(42.250,00)	99,64
Belanja Cetak	3.125.360,00	3.125.360,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	8.528.250,00	8.486.000,00	(42.250,00)	99,50
Belanja Makanan dan Minuman	69.360.000,00	68.550.000,00	(810.000,00)	98,83
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	68.310.000,00	67.500.000,00	(810.000,00)	98,81
Belanja Perjalanan Dinas	33.424.600,00	27.377.000,00	(6.047.600,00)	81,91
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.424.600,00	27.377.000,00	(6.047.600,00)	81,91
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	32.340.000,00	30.580.000,00	(1.760.000,00)	94,56
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	32.340.000,00	30.580.000,00	(1.760.000,00)	94,56
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah Penunjang	346.412.880,00	318.020.480,00	(28.392.400,00)	91,80
Belanja Barang dan Jasa	346.412.880,00	318.020.480,00	(28.392.400,00)	91,80
Belanja Bahan Pakai Habis	6.011.100,00	6.011.100,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	3.747.300,00	3.747.300,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	2.263.800,00	2.263.800,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	16.023.220,00	16.023.220,00	0,00	100,00
·		,	•	
Belanja Seminar Kit	16.023.220,00	16.023.220,00	0,00	100,00
Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	16.030.060,00	16.030.060,00	0,00	100,00
Belanja Cetak	5.600.060,00	5.600.060,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	10.430.000,00	10.430.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa	11.020.000,00	10.640.000,00	(380.000,00)	96,55
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	11.020.000,00	10.640.000,00	(380.000,00)	96,55
Belanja Makanan dan Minuman	90.300.000,00	85.550.000,00	(4.750.000,00)	94,74
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.150.000,00	1.650.000,00	(1.500.000,00)	52,38
Belanja makanan dan minuman pelatihan	87.150.000,00	83.900.000,00	(3.250.000,00)	96,27
Belanja Perjalanan Dinas	95.178.500,00	88.121.100,00	(7.057.400,00)	92,59
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	46.111.600,00	45.339.400,00	(772.200,00)	98,33
Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.066.900,00	42.781.700,00	(6.285.200,00)	87,19
Belanja Jasa Tenaga	52.350.000,00	46.245.000,00	(6.105.000,00)	88,34
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga	52.350.000,00	46.245.000,00	(6.105.000,00)	88,34
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Transportasi dan Akomodasi	59.500.000,00	49.400.000,00	(10.100.000,00)	83,03



Peserta				
Belanja Transportasi Peserta	40.000.000,00	32.000.000,00	(8.000.000,00)	80,00
Belanja Akomodasi Peserta	19.500.000,00	17.400.000,00	(2.100.000,00)	89,23
Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	924.038.538,00	863.344.070,00	(60.694.468,00)	93,43
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	84.860.175,00	79.668.700,00	(5.191.475,00)	93,88
Belanja Barang dan Jasa	84.860.175,00	79.668.700,00	(5.191.475,00)	93,88
Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.400,00	1.023.400,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	323.400,00	323.400,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	3.812.025,00	3.811.500,00	(525,00)	99,99
Belanja Seminar Kit	3.812.025,00	3.811.500,00	(525,00)	99,99
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.782.750,00	6.780.000,00	(2.750,00)	99,96
Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	6.032.750,00	6.030.000,00	(2.750,00)	99,95
Belanja Makanan dan Minuman	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan Dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
Tamu Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	20.142.000,00	15.613.800,00	(4.528.200,00)	77,52
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.142.000,00	15.613.800,00	(4.528.200,00)	77,52
Belanja Jasa Tenaga	19.800.000,00	19.140.000,00	(660.000,00)	96,67
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	19.800.000,00	19.140.000,00	(660.000,00)	96,67
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	169.654.600,00	153.499.470,00	(16.155.130,00)	90,48
Belanja Barang dan Jasa	169.654.600,00	153.499.470,00	(16.155.130,00)	90,48
Belanja Bahan Pakai Habis	2.046.800,00	2.046.800,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	646.800,00	646.800,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	7.624.050,00	7.624.050,00	0,00	100,00
Belanja Seminar Kit	7.624.050,00	7.624.050,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.499.750,00	13.493.000,00	(6.750,00)	99,95
Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	11.999.750,00	11.993.000,00	(6.750,00)	99,94
Belanja Makanan dan Minuman	66.600.000,00	66.060.000,00	(540.000,00)	99,19
Belanja Makanan Dan Minuman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
Tamu Belanja makanan dan minuman pelatihan	64.800.000,00	64.260.000,00	(540.000,00)	99,17
Belanja Perjalanan Dinas	40.284.000,00	29.185.620,00	(11.098.380,00)	72,45
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.284.000,00	29.185.620,00	(11.098.380,00)	72,45
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	39.600.000,00	35.090.000,00	(4.510.000,00)	88,61



Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	39.600.000,00	35.090.000,00	(4.510.000,00)	88,61
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	669.523.763,00	630.175.900,00	(39.347.863,00)	94,12
Belanja Barang dan Jasa	669.523.763,00	630.175.900,00	(39.347.863,00)	94,12
Belanja Bahan Pakai Habis	4.036.200,00	4.036.200,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	1.320.200,00	1.320.200,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	18.537.513,00	18.504.000,00	(33.513,00)	99,82
Belanja Seminar Kit	14.937.513,00	14.904.000,00	(33.513,00)	99,78
Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	34.306.750,00	34.304.500,00	(2.250,00)	99,99
Belanja Cetak	3.334.000,00	3.334.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	30.972.750,00	30.970.500,00	(2.250,00)	99,99
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	193.805.000,00	182.825.000,00	(10.980.000,00)	94,33
Belanja Makanan Dan Minuman	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
Tamu Belanja makanan dan minuman pelatihan	189.605.000,00	178.625.000,00	(10.980.000,00)	94,21
Belanja Perjalanan Dinas	230.324.600,00	206.992.500,00	(23.332.100,00)	89,87
Belanja Perjalanan Dinas Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00
Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.324.600,00	206.992.500,00	(23.332.100,00)	89,87
Belanja Jasa Tenaga	111.720.000,00	106.720.000,00	(5.000.000,00)	95,52
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	111.720.000,00	106.720.000,00	(5.000.000,00)	95,52
Belanja Transportasi dan Akomodasi	63.543.700,00	63.543.700,00	0,00	100,00
Peserta Belanja Transportasi Peserta	47.943.700,00	47.943.700,00	0,00	100,00
Belanja Akomodasi Peserta	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00
Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	1.075.394.510,00	1.052.313.590,00	(23.080.920,00)	97,85
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	231.048.570,00	213.650.500,00	(17.398.070,00)	92,47
Belanja Barang dan Jasa	231.048.570,00	213.650.500,00	(17.398.070,00)	92,47
Belanja Bahan Pakai Habis	4.526.640,00	4.520.800,00	(5.840,00)	99,87
Belanja Dokumentasi	882.880,00	882.800,00	(80,00)	99,99
Belanja Dekorasi	3.643.760,00	3.638.000,00	(5.760,00)	99,84
Belanja Bahan/Material	18.625.470,00	18.617.000,00	(8.470,00)	99,95
Belanja Seminar Kit	18.625.470,00	18.617.000,00	(8.470,00)	99,95
Belanja Cetak dan Penggandaan	5.945.860,00	5.942.500,00	(3.360,00)	99,94
Belanja Cetak	1.913.360,00	1.910.000,00	(3.360,00)	99,82
Belanja Penggandaan	4.032.500,00	4.032.500,00	0,00	100,00



				-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	50.035.000,00	49.350.000,00	(685.000,00)	98,63
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	47.935.000,00	47.250.000,00	(685.000,00)	98,57
Belanja Perjalanan Dinas	71.927.600,00	67.744.900,00	(4.182.700,00)	94,18
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.518.600,00	50.518.600,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.409.000,00	17.226.300,00	(4.182.700,00)	80,46
Belanja Jasa Tenaga	26.550.000,00	22.830.000,00	(3.720.000,00)	85,99
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	26.550.000,00	22.830.000,00	(3.720.000,00)	85,99
Belanja Transportasi dan Akomodasi	53.438.000,00	44.645.300,00	(8.792.700,00)	83,55
Peserta Belanja Transportasi Peserta	31.788.000,00	26.720.300,00	(5.067.700,00)	84,06
Belanja Akomodasi Peserta	21.650.000,00	17.925.000,00	(3.725.000,00)	82,79
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural	80.000.000,00	74.392.150,00	(5.607.850,00)	92,99
Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	74.392.150,00	(5.607.850,00)	92,99
Belanja Bahan Pakai Habis	441.440,00	441.400,00	(40,00)	99,99
Belanja Dokumentasi	441.440,00	441.400,00	(40,00)	99,99
Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bahan/Material	6.573.847,00	6.572.600,00	(1.247,00)	99,98
Belanja Seminar Kit	6.073.847,00	6.072.600,00	(1.247,00)	99,98
Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.271.713,00	3.268.250,00	(3.463,00)	99,89
Belanja Cetak	1.849.463,00	1.846.000,00	(3.463,00)	99,81
Belanja Penggandaan	1.422.250,00	1.422.250,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja sewa tempat lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman	18.720.000,00	16.410.000,00	(2.310.000,00)	87,66
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	17.970.000,00	15.660.000,00	(2.310.000,00)	87,15
Belanja Perjalanan Dinas	13.570.000,00	12.381.000,00	(1.189.000,00)	91,24
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.570.000,00	12.381.000,00	(1.189.000,00)	91,24
Belanja Jasa Tenaga	16.860.000,00	16.260.000,00	(600.000,00)	96,44
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga	16.860.000,00	16.260.000,00	(600.000,00)	96,44



ahli/instruktur/Narasumber				
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	13.478.000,00	11.973.900,00	(1.504.100,00)	88,84
Belanja Transportasi Peserta	11.478.000,00	10.553.900,00	(924.100,00)	91,95
Belanja Akomodasi Peserta	2.000.000,00	1.420.000,00	(580.000,00)	71,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	764.345.940,00	764.270.940,00	(75.000,00)	99,99
Belanja Barang dan Jasa	764.345.940,00	764.270.940,00	(75.000,00)	99,99
Belanja Bahan Pakai Habis	7.282.840,00	7.282.840,00	0,00	100,00
Belanja Dokumentasi	882.840,00	882.840,00	0,00	100,00
Belanja Dekorasi	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00
Belanja Bahan/Material	12.449.500,00	12.449.500,00	0,00	100,00
Belanja Seminar Kit	12.449.500,00	12.449.500,00	0,00	100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	14.789.000,00	14.789.000,00	0,00	100,00
Belanja Cetak	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00
Belanja Penggandaan	13.469.000,00	13.469.000,00	0,00	100,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.075.000,00	9.000.000,00	(75.000,00)	99,17
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.075.000,00	9.000.000,00	(75.000,00)	99,17
Belanja Makanan dan Minuman	273.465.000,00	273.465.000,00	0,00	100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	271.215.000,00	271.215.000,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	170.494.600,00	170.494.600,00	0,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.494.600,00	170.494.600,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	100,00
ahli/instruktur/Narasumber Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	100,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	175.590.000,00	175.590.000,00	0,00	100,00
Belanja Transportasi Peserta	139.590.000,00	139.590.000,00	0,00	100,00
Belanja Akomodasi Peserta	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(19.945.108.041,81)	(19.298.610.660,00)	646.497.381,81	96,76



Sedangkan untuk Belanja tak langsung terealisasi sebesar Rp. 12.397.614.302,digunakan untu membayar gaji dan tunjangan Pegawai dilingkungan BPSDM Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	+/-	%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.858.580.921,81	12.397.614.302,00	(460.966.619,81)	96,42
Belanja Pegawai	12.858.580.921,81	12.397.614.302,00	(460.966.619,81)	96,42
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.580.122.350,23	7.213.658.615,00	(366.463.735,23)	95,17
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.534.778.030,60	5.348.202.100,00	(186.575.930,60)	96,63
Tunjangan Keluarga	568.091.918,58	547.727.866,00	(20.364.052,58)	96,42
Tunjangan Jabatan	260.115.992,50	244.030.000,00	(16.085.992,50)	93,82
Tunjangan Fungsional	359.878.200,00	313.000.000,00	(46.878.200,00)	86,97
Tunjangan Fungsional Umum	153.995.670,00	139.485.000,00	(14.510.670,00)	90,58
Tunjangan Beras	319.252.663,72	255.859.860,00	(63.392.803,72)	80,14
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.543.186,89	17.898.350,00	(2.644.836,89)	87,13
Pembulatan Gaji	72.478,78	68.949,00	(3.529,78)	95,13
Iuran Asuransi Kesehatan	303.559.484,18	303.559.484,00	(0,18)	100,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	14.162.806,06	10.956.728,00	(3.206.078,06)	77,36
Belanja Jaminan Kematian	45.671.918,92	32.870.278,00	(12.801.640,92)	71,97
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.278.458.571,58	5.183.955.687,00	(94.502.884,58)	98,21
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	5.278.458.571,58	5.183.955.687,00	(94.502.884,58)	98,21

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja dengan rincian tabel sebagai berikut :



TABEL.3.1

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TH.2020

No	URAIAN	TAHUN 2020			% ANGGARAN DAN
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	REALISASI
				•	
1	PENDAPATAN	124.535.000,00	29.335.000,00	(95.200.000,00)	23,56
	- RETRIBUSI PELAYANAN	124.535.000,00	29.335.000,00	(95.200.000,00)	
	PENDIDIKAN				
	- RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN			-	
	DAERAH				
2	BELANJA	20.069.443.041,81	19.327.945.658,00	(741.497.383,81)	96,31
	- BELANJA OPERASI	19.487.491.321,81	18.756.954.714,00	(730.536.607,81)	96,25
	- BELANJA PEGAWAI	12.858.580.921,81	12.397.614.300,00	(460.966.621,81)	96,42
	- BELANJA BARANG	6.628.910.400,00	6.359.340.414,00	(269.569.986,00)	95,93
	- BELANJA MODAL	581.951.720,00	570.990.944,00	(10.960.776,00)	98,12
	- BELANJA PERALATAN	343.997.120,00	333.798.370,00	(10.198.750,00)	97,04
	DAN MESIN				
	- BELANJA BANGUNAN	199.888.000,00	199.278.000,00	(610.000,00)	99,69
	DAN GEDUNG				
	- BELANJA JALAN, IRIGASI	-	-	-	-
	DAN JARINGAN				
	- BELANJA ASET TETAP LAINNYA	38.066.600,00	37.914.574,00	(152.026,00)	99,60



Jika dilakukan persentase perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2020 maka dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel.3.2.

Ikhtisar Target dan realisiasi Pendapatan dan Belanja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Prov.Jambi
Tahun anggaran 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	24.335.000,-	29.335.000,-	23,59
2	Belanja	20.069.443.041,81	19.327.945.660,-	96,31
	Surplus(defisit)	(19.945.108.041,81,-)	(19.298.610.660,-)	(96,76)
3	Pembiayaan	0	0	0

Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut diatas, kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 124.335.000,- (
 Seratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) terealisasi
 sebesar Rp. 29.335.000,- (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima
 ribu rupiah) Persentase tercapainya target penerimaan secara keseluruhan
 adalah 23,59% dengan rincian sebagai berikut :



		Realisasi	anggaran	+/-	%
1	PENDAPATAN	124.535.000,00	29.335.000,00	(95.200.000,00)	23,59
	- RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN	124.535.000,00	29.335.000,00	(95.200.000,00)	
	- RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAFRAH			-	

 Dari tabel diatas maka terdapat surplus dan defisit PAD, yaitu dari Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak tercapai target penerimaan sebesar Rp. 95.200.000,- atau hanya tercapai 23,59 %.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

3.2.1. PENDAPATAN.

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) telah berupaya dalam rangka pencapaian target baik itu target penerimaan maupun target belanja. Penurunan PAD disebabkan karena terjadinya bencana alam yaitu adanya pandemic virus corona yang menyebabkan berkurangnya anggaran kediklatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan kontribusi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan dan juga adanya himbauan dari Pemerintah untuk tidak melakukan kerumunan yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan pengiriman peserta untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan baik itu PKA maupun PKP pada Tahun 2020.



Untuk Retribusi sewa ruangan juga hanya mampu terealisasi sebesar 23,59 % hal ini juga disebabkan adanya bencana pandemic virus corona sehingga masyaraakat tidak boleh melakukan kerumunan yang berpotensi mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Terkait hal tersebut terjadi volume penurunan sewa auditorium, sewa asrama,sewa ruang belajar pada BPSDM Provinsi Jambi.

Dengan demikian jika dibandingkan target dan realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	URAIAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
INO	UKAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	PENDAPATAN	2.870.990.000,00	2.039.365.000,00	(831.625.000,00)	124.535.000,00	29.335.000,00	(95.200.000,00)
	- RETRIBUSI PELAYANAN	2.380.990.000,00	1.196.040.000,00	(1.184.950.000,00)	124.535.000,00	29.335.000,00	(95.200.000,00)
	PENDIDIKAN						
	- RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN	490.000.000,00	843.325.000,00	353.325.000,00	-	-	-
	DAERAH						

3.2.2 BELANJA

Pada Tahun 2020 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi, telah berupaya untuk memaksimalkan anggaran belanja, antara lain dengan melakukan pergeseran belanja baik itu belanja langsung maupun belanja tak langsung. Pengalokasian belanja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terjadi inefisiensi anggaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum didalam didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2020 mengacu pada Rencana Staregis yang telah ditetapkan sebelumnya namun pada Tahun 2020 karena meningkatnya kejadian pandemic virus corona



menyebabkan aanggaran kediklatan pada BPSDM Provinsin Jambi mengalami refocusing, hal ini menyebabkan seluruh kegiatan mengalami penurunan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kediklatan tidak berjalan maksimal.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Perhitungan Anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam 13 Tahun 2006 Pedoman Negeri Nomor tentang Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Kebijakan akuntansi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini mencakup:

- Entitas pelaporan;
- 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 4) Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam masa transisi;
- Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan.

4.1 Entitas akuntansi/ entitas Pelaporan keuangan

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam



hal ini Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada entitas pelaporan yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun 2019 kepada Kepala Daerah untuk disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

4.2 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas

Kas masuk diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas BPSDM Provinsi Jambi dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening BPSDM Provinsi Jambi. Penerimaan Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi menggunakan perhitungan Basis Kas karena sistem pembayaran menggunakan Tanda Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima BPSDM Provinsi Jambi dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk setoran Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Provinsi Jambi, sedangkan

untuk Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan menggunakan sistem self assesment dimana BKD Kabupaten/Kota melakukan penyetoran

langsung ke Kas Daerah Provinsi Jambi.

2. Basis Akrual (accrual basis) untuk penyusunan Neraca

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya

transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam

laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih

dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan

Laporan Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

I. NERACA

1) Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran

33



Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Kas dalam pengelolaan bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Kas dalam pengelolaan Bendahara penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung dan akan disetor ke Kas Daerah. Termasuk dalam katagori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

Piutang Pajak/Retribusi

- Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKR).
- Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
- Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau Nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net reliazabel Value).

Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal atas saldo pinjaman yang belum dilunasi sampai akhir tahun anggaran.

Persediaan.

 Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang



yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

2).Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan,hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dari sitaan atau rampasan.
- b) Aset tetap teridri dari kelompok :
 - Tanah.
 - Peralatan dan Mesin
 - Gedung dan bangunan
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset tetap lainnya dan
 - Kontruksi dalam pengerjaan.



- c) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum sesuai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya.
- d) Aset Tetap BPSDM Provinsi Jambi dalam Tahun 2020 telah dilakukan penyusutan.
- e) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang,hilang dsb berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- f) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga pengganti pada saat diperoleh.

3). Aset lainnya.

- a. Aset lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar,aset tetap maupun investasi jangka panjang.
- b. Aset lainnya diantaranya terdiri atas :
 - Tagihan penjualan angsuran.
 - Tuntutan ganti rugi
 - Kemitraan dengan Pihak ketiga (Built operate transfer/BOT)
 - Aset tak berwujud
 - Aset lainnya.
- c. Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan.Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan



aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

4) Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek.

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek dianataranya terdiri atas :
 - Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - Bagian lancar utang jangka panjang yang jatuh tempo.
 - Utang jangka pendek.
- c. Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal.Utang dalam valuta asing dikonversikan kerupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal.Utang dalam valuta asing



dikonversikan kerupiah berdasarkn nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal transaksi.

5) EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.



II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Penerimaan

Penerimaan adalah semua penerimaan Kas BPSDM Provinsi Jambi dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak SKPD. Penerimaan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima dari Kas Daerah. Pencatatan penerimaan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas BPSDM Provinsi Jambi. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1 Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-pos pelaporan keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Hal-hal yang mencakup dalam Laporan Keuangan dimaksud adalah meliputi antara lain :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

I. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan yang menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 serta menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan,Belanja,surplus/defisit dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.



A. PENDAPATAN

Penerimaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Pembangunan di Provinsi Jambi. Adapun Peraturan Daerah yang mendasari pemungutan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening ayat penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari dari penerimaan sewa aula, sewa ruang belajar dan sewa kamar pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan tarif retribusi pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kode rekening penerimaan Retribusi pelayanan pendidikan yang berasal dari Penerimaan setoran pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan bagi Pengawas dan Diklat Kepemimpinan bagi Administrator yang anggaran pelaksanaannya berasal dari dan Kabupaten dilingkungan Pemerintah Provinsi Kota Jambi (Pola Kontribusi), namun pada tahun 2020 tidak ada penerimaan dari Retribusi tersebut karena refocusing anggaran kediklatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang ada penerimaan hanya dari Retribusi pemakainan kekayaan daerah sebagaimana tercantum berikut ini:



Tabel.5.3

Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah

No	Jenis penerimaan	Jumlah penerimaan
1	Sewa Aula	29.335.000,-
2	Sewa Kamar Asrama 1 dan 2	0
3	Sewa Ruang Belajar	0
		Rp. 29.335.000,-

b). BELANJA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penggunaan anggaran satuan kerja.

Perbandingan antara anggaran belanja Tahun 2019 dan 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :



Tabel.5.4

PERBANDINGAN REALISASI BELANJA TAHUN 2019 DAN 2020

Na	URAIAN		TAHUN 2019			TAHUN 2020	
No		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
2	BELANJA	29.225.684.536,00	25.893.941.374,00	(3.331.743.162,00)	20.069.443.041,81	19.327.945.658,00	(741.497.383,81)
	- BELANJA OPERASI	27.749.723.786,00	24.557.085.708,00	(3.192.638.078,00)	19.487.491.321,81	18.756.954.714,00	(730.536.607,81)
	- BELANJA PEGAWAI	14.359.384.836,00	12.486.150.777,00	(1.873.234.059,00)	12.858.580.921,81	12.397.614.300,00	(460.966.621,81)
	- BELANJA BARANG	13.390.338.950,00	12.070.934.931,00	(1.319.404.019,00)	6.628.910.400,00	6.359.340.414,00	(269.569.986,00)
	- BELANJA MODAL	1.475.960.750,00	1.336.855.666,00	(139.105.084,00)	581.951.720,00	570.990.944,00	(10.960.776,00)
	- BELANJA PERALATAN	575.742.000,00	448.384.000,00	(127.358.000,00)	343.997.120,00	333.798.370,00	(10.198.750,00)
	DAN MESIN						
	- BELANJA BANGUNAN	637.000.000,00	626.865.666,00	(10.134.334,00)	199.888.000,00	199.278.000,00	(610.000,00)
	DAN GEDUNG						
	- BELANJA JALAN, IRIGASI	225.000.000,00	223.403.000,00	(1.597.000,00)	-	-	-
	DAN JARINGAN						
	- BELANJA ASET TETAP LAINNYA	38.218.750,00	38.203.000,00	(15.750,00)	38.066.600,00	37.914.574,00	(152.026,00)

Jika dilakukan perbandingan antara Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 29.225.684.536,- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 20.069.443.041,81,- berarti mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 9.156.241.494,19,- sedangkan realisasi belanja Tahun 2019 sebesar Rp. 25.893.941.374,- dan Tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp. 19.327.945.658,- atau berkurang sebesar Rp. 6.565.995.716,- Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja Operasi digunakan untuk membiayai Belanja langsung dan tak langsung yang meliputi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan serta Belanja Barang dan jasa.



 Belanja Pegawai sebesaar Rp. 12.972.812.902,- digunakan untuk membayar gaji,tunjangan ASN dan Honorarium panitia pelaksana kegiatan dilingkungan BPSDM Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA TAK LANGSUNG		12.397.614.302,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	7.213.658.615,00	
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.348.202.100,00	
Tunjangan Keluarga	547.727.866,00	
Tunjangan Jabatan	244.030.000,00	
Tunjangan Fungsional	313.000.000,00	
Tunjangan Fungsional Umum	139.485.000,00	
Tunjangan Beras	255.859.860,00	
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.898.350,00	
Pembulatan Gaji	68.949,00	
Iuran Asuransi Kesehatan	303.559.484,00	
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	10.956.728,00	
Belanja Jaminan Kematian	32.870.278,00	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.183.955.687,00	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Keria	0,00	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan	5.183.955.687,00	
Prestasi Kerja <mark>BELANJA LANGSUNG</mark>		575.198.600,00

 Belanja Barang digunakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp.5.784.141.814,00 digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum didalam DPA BPSDM Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA LANGSUNG BELANJA BARANG DAN JASA	5.784.141.814,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.292.934.542,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.289.000,00
Belanja Barang dan Jasa	2.289.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00
Belanja Jasa Kantor	939.000,00



Belanja Paket/Pengiriman	939.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	812.782.296,00	
Belanja Barang dan Jasa	812.782.296,00	
Belanja Jasa Kantor	812.782.296,00	
Belanja Telepon	1.518.500,00	
Belanja Air	80.510.250,00	
Belanja Listrik	570.753.546,00	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	160.000.000,00	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	466.800.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	466.800.000,00	
Belanja Jasa Kantor	466.800.000,00	
Belanja Jasa Kebersihan Kantor	466.800.000,00	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	54.943.500,00	
Belanja Barang dan Jasa	54.943.500,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	54.943.500,00	
Belanja Alat Tulis Kantor	54.943.500,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.800.625,00	
Belanja Barang dan Jasa	24.800.625,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	24.800.625,00	
Belanja Cetak	15.433.825,00	
Belanja Penggandaan	9.366.800,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.335.950,00	
Belanja Barang dan Jasa	23.335.950,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	23.335.950,00	
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.335.950,00	
Penyediaan Makanan dan Minuman	64.738.444,00	
Belanja Barang dan Jasa	64.738.444,00	
Belanja Makanan dan Minuman	64.738.444,00	
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.965.300,00	



Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	14.983.144,00	
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan	34.790.000,00	
Kegiatan		
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	9.450.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
Belanja Penggandaan	0,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.450.000,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.450.000,00	
Keikutsertaan Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan dalam dan luar daerah	354.331.553,00	
Belanja Barang dan Jasa	354.331.553,00	
Belanja Perjalanan Dinas	354.331.553,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.560.617,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	198.770.936,00	
Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip	28.350.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	11.450.000,00	
Belanja Publikasi	11.450.000,00	
Belanja Jasa Kantor	16.900.000,00	
Belanja Surat Kabar/Majalah	4.400.000,00	
Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi	12.500.000,00	
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	12.000.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.103.551.024,00	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	384.131.834,00	
Belanja Barang dan Jasa	50.333.464,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	50.333.464,00	
Belanja alat rumah tangga pakai habis	50.333.464,00	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	74.560.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	74.560.000,00	
Belanja Pemeliharaan	74.560.000,00	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	74.560.000,00	



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	184.780.097,00
Belanja Barang dan Jasa	184.780.097,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	184.780.097,00
Belanja Jasa Service	46.560.997,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	123.796.800,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.422.300,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	98.801.093,00
Belanja Barang dan Jasa	98.801.093,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.801.093,00
rogram Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00
rogram Manajemen Layanan Pengembangan SDM	576.327.271,00
Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal	229.452.071,00
Belanja Barang dan Jasa	229.452.071,0
Belanja Jasa Kantor	500.000,0
Belanja Jasa Iuran	500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.287.000,00
Belanja Cetak	2.000.000,00
Belanja Penggandaan	2.287.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	166.099.071,0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127.799.071,0
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	49.366.000,00
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	49.366.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.200.000,0
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	9.200.000,0
Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD	48.299.500,0
Belanja Barang dan Jasa	48.299.500,0
Belanja Cetak dan Penggandaan	12.604.500,00
Belanja Cetak	9.005.000,0
Belanja Penggandaan	3.599.500,00



Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
Belanja makanan dan minuman Sosialisasi	0,00	
•	,	
Belanja Perjalanan Dinas	35.695.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.695.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	0,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	0,00	
Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur	87.466.600,00	
Belanja Barang dan Jasa	87.466.600,00	
Palania Pahan Pakai Habia	000 000 00	
Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
Belanja Dokumentasi	450.000,00	
Belanja Dekorasi	450.000,00	
Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
Belanja Seminar Kit	9.000.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
Belanja Cetak	500.000,00	
Belanja Penggandaan	750.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman	30.450.000,00	
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	450.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	30.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	32.566.600,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.566.600,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	13.300.000,00	
Belanja Jasa Tenaga	13.300.000,00	
ahli/instruktur/Narasumber		
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur	114.058.100,00	
Belanja Barang dan Jasa	114.058.100,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
Belanja Penggandaan	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas	114.058.100,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.802.800,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.255.300,00	
Pembuatan Buletin/Majalah/Jurnal Ilmiah	85.051.000,00	



Pengembangan SDM Aparatur

Belanja Barang dan Jasa	85.051.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	44.201.000,00
Belanja Cetak	44.000.000,00
Belanja Penggandaan	201.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00
Belanja makanan dan minuman Sosialisasi	5.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00
belanja Penjalanan Dinas Luai Daeran	0,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	35.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	35.750.000,00
Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kelembagaan	518.636.674,00
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi	280.070.058,00
Belanja Barang dan Jasa	280.070.058,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000,00
Belanja Dokumentasi	1.155.000,00
Belanja Bahan/Material	14.831.763,00
Belanja Seminar Kit	14.831.763,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.166.000,00
Belanja Cetak	3.244.000,00
Belanja Penggandaan	922.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	70.020.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.895.000,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	67.125.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	113.882.295,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.994.700,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	104.887.595,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	76.015.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	76.015.000,00
Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	100.077.781,00
Belanja Barang dan Jasa	100.077.781,00



Belanja Bahan Pakai Habis	0,00
Belanja Dokumentasi	0,00
Belanja Dekorasi	0,00
Belanja Bahan/Material	0,00
Belanja Seminar Kit	0,00
•	•
Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00
Belanja Cetak	0,00
Belanja Penggandaan	0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00
Belanja Makanan dan Minuman	0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	98.427.781,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.042.800,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.384.981,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	0,00
Belanja Jasa Tenaga	0,00
ahli/instruktur/Narasumber	
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	1.650.000,00
Belanja Transportasi Peserta	1.650.000,00
Belanja Akomodasi Peserta	0,00
Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	138.488.835,00
Belanja Barang dan Jasa	138.488.835,00
Belanja Bahan Pakai Habis	2.593.600,00
Belanja Dokumentasi	1.300.000,00
Belanja Dekorasi	1.293.600,00
Belanja Bahan/Material	9.936.585,00
Belanja Seminar Kit	9.936.585,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	8.947.750,00
Belanja Cetak	1.550.000,00
Belanja Penggandaan	7.397.750,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00



Belanja Makanan dan Minum	an	30.325.000,00
Belanja Makanan Dan Min	uman Tamu	2.700.000,00
Belanja makanan dan min	iuman pelatihan	27.625.000,00
Belanja Perjalanan Dinas		65.365.900,00
Belanja Perjalanan Dinas I	Dalam Daerah	32.691.100,00
Belanja Perjalanan Dinas I	Luar Daerah	32.674.800,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instr	ruktur/Narasumber	21.320.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumbe	er	21.320.000,00
Belanja Transportasi dan Akoi	modasi Peserta	0,00
Belanja Transportasi Pese	rta	0,00
Belanja Akomodasi Peser	ta	0,00
Program Pengembangan Kompeten Pemerintahan Konkuren dan Teknis		523.224.187,00
Kegiatan Pengembangan Kompe Administrasi Urusan Konkuren W Dasar dan Pilihan		58.998.314,00
Belanja Barang dan Jasa		58.998.314,00
Belanja Bahan Pakai Habis		1.228.920,00
Belanja Dokumentasi		582.120,00
Belanja Dekorasi		646.800,00
Belanja Bahan/Material		3.047.134,00
Belanja Seminar Kit		530.334,00
Belanja Bahan Praktek da	n Percontohan	2.516.800,00
Belanja Cetak dan Pengganda	ian	3.947.860,00
Belanja Cetak		1.465.360,00
Belanja Penggandaan		2.482.500,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung	/Gudang/Parkir	0,00
Belanja Sewa Ruang Rapa	at/Pertemuan	0,00
Belanja Makanan dan Minum	an	27.450.000,00
Belanja Makanan Dan Min		450.000,00
Belanja makanan dan min	uman pelatihan	27.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas		6.274.400,00
Belanja Perjalanan Dinas I	Luar Daerah	6.274.400,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instr	ruktur/Narasumber	17.050.000,00
Belanja Jasa Tenaga		17.050.000,00



ahli/instruktur/Narasumber		
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	0,00	
Belanja Transportasi Peserta	0,00	
Belanja Akomodasi Peserta	0,00	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	146.205.393,00	
Belanja Barang dan Jasa	146.205.393,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	3.060.600,00	
Belanja Dokumentasi	1.767.000,00	
Belanja Dekorasi	1.293.600,00	
Belanja Bahan/Material	5.026.433,00	
Belanja Seminar Kit	5.026.433,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.611.360,00	
Belanja Cetak	3.125.360,00	
Belanja Penggandaan	8.486.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman	68.550.000,00	
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.050.000,00	
Belanja makanan dan minuman pelatihan	67.500.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	27.377.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.377.000,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	30.580.000,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	30.580.000,00	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah Penunjang	318.020.480,00	
Belanja Barang dan Jasa	318.020.480,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	6.011.100,00	
Belanja Dokumentasi	3.747.300,00	
Belanja Dekorasi	2.263.800,00	
Belanja Bahan/Material	16.023.220,00	
Belanja Seminar Kit	16.023.220,00	
Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	0,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	16.030.060,00	
Belanja Cetak	5.600.060,00	



Belanja Penggandaan	10.430.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.640.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.640.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	85.550.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.650.000,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	83.900.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	88.121.100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.339.400,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.781.700,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	46.245.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	46.245.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	49.400.000,00
Belanja Transportasi Peserta	32.000.000,00
Belanja Akomodasi Peserta	17.400.000,00
Program Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	863.344.070,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	79.668.700,00
Belanja Barang dan Jasa	79.668.700,00
Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.400,00
Belanja Dokumentasi	700.000,00
Belanja Dekorasi	323.400,00
Belanja Bahan/Material	3.811.500,00
Belanja Seminar Kit	3.811.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	6.780.000,00
Belanja Cetak	750.000,00
Belanja Penggandaan	6.030.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	33.300.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	900.000,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	32.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	15.613.800,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.613.800,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	19.140.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	19.140.000,00



Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	153.499.470,00
Belanja Barang dan Jasa	153.499.470,00
Belanja Bahan Pakai Habis	2.046.800,00
Belanja Dokumentasi	1.400.000,00
Belanja Dekorasi	646.800,00
Belanja Bahan/Material	7.624.050,00
Belanja Seminar Kit	7.624.050,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	13.493.000,00
Belanja Cetak	1.500.000,00
Belanja Penggandaan	11.993.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	66.060.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.800.000,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	64.260.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	29.185.620,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.185.620,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	35.090.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	35.090.000,00
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	630.175.900,00
Belanja Barang dan Jasa	630.175.900,00
Belanja Bahan Pakai Habis	4.036.200,00
Belanja Dokumentasi	2.716.000,00
Belanja Dekorasi	1.320.200,00
Belanja Bahan/Material	18.504.000,00
Belanja Seminar Kit	14.904.000,00
Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	3.600.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	34.304.500,00
Belanja Cetak	3.334.000,00
Belanja Penggandaan	30.970.500,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.250.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	182.825.000,00



Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.200.000,00	
Belanja makanan dan minuman pelatihan	178.625.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	206.992.500,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	206.992.500,00	
Polania Jaca Tonaga ahli/inetruktur/Navasumhor	106 720 000 00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	106.720.000,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	106.720.000,00	
	62 542 700 00	
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	63.543.700,00	
Belanja Transportasi Peserta	47.943.700,00	
Belanja Akomodasi Peserta	15.600.000,00	
Program Pengembangan Kompetensi Manajerial	1.052.313.590,00	
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	213.650.500,00	
Belanja Barang dan Jasa	213.650.500,00	
Belanja Bahan Pakai Habis	4.520.800,00	
Belanja Dokumentasi	882.800,00	
Belanja Dekorasi	3.638.000,00	
Belanja Bahan/Material	18.617.000,00	
Belanja Seminar Kit	18.617.000,00	
Belanja Cetak dan Penggandaan	5.942.500,00	
Belanja Cetak	1.910.000,00	
Belanja Penggandaan	4.032.500,00	
Polania Sowa Rumah/Coduna/Cudana/Parkir	0.00	
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
Belanja Makanan dan Minuman	49.350.000,00	
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.100.000,00	
Belanja makanan dan minuman pelatihan	47.250.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	67.744.900,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.518.600,00	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.226.300,00	
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	22.830.000,00	
Belanja Jasa Tenaga	22.830.000,00	
ahli/instruktur/Narasumber	22.030.000,00	
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	44.645.300,00	
belanja manoportasi aan Akomoaasi i eserta	1 110 13.300,00	



Belanja Transpo	rtasi Peserta	26.720.300,00	
Belanja Akomod		17.925.000,00	
Kegiatan Pengembangai Struktural	n Kompetensi Jabatan	74.392.150,00	
Belanja Barang dan J	asa	74.392.150,00	
Belanja Bahan Pakai	Habis	441.400,00	
Belanja Dokume	ntasi	441.400,00	
Belanja Dekoras	İ	0,00	
Belanja Bahan/Mate	rial	6.572.600,00	
Belanja Seminar	Kit	6.072.600,00	
Belanja Bahan P	raktek dan Percontohan	500.000,00	
Belanja Jasa Kantor		4.085.000,00	
Belanja Jasa Pel	ayanan Kesehatan	4.085.000,00	
Belanja Cetak dan P	enggandaan	3.268.250,00	
Belanja Cetak		1.846.000,00	
Belanja Penggar	ndaan	1.422.250,00	
Belanja Sewa Ruma	h/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
Belanja Sewa Ru	uang Rapat/Pertemuan	0,00	
Belanja sewa ter	mpat lainnya	3.000.000,00	
Belanja Makanan da	n Minuman	16.410.000,00	
Belanja Makanar	n Dan Minuman Tamu	750.000,00	
Belanja makana	n dan minuman pelatihan	15.660.000,00	
Belanja Perjalanan [Dinas	12.381.000,00	
Belanja Perjalan	an Dinas Luar Daerah	12.381.000,00	
Belanja Jasa Tenaga	a ahli/instruktur/Narasumber	16.260.000,00	
Belanja Jasa Ter		16.260.000,00	
ahli/instruktur/N Belanja Transportasi	arasumber i dan Akomodasi Peserta	11.973.900,00	
Belanja Transpo	rtasi Peserta	10.553.900,00	
Belanja Akomoo	dasi Peserta	1.420.000,00	
Kegiatan Pengembangai Kepemimpinan dan Praj		764.270.940,00	
Belanja Barang dan J	asa	764.270.940,00	
Belanja Bahan Pakai	Habis	7.282.840,00	
Belanja Dokume	ntasi	882.840,00	
Belanja Dekoras		6.400.000,00	
-		,	



Belanja Bahan/Material	12.449.500,00
Belanja Seminar Kit	12.449.500,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	14.789.000,00
Belanja Cetak	1.320.000,00
Belanja Penggandaan	13.469.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	273.465.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.250.000,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan	271.215.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	170.494.600,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	170.494.600,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	101.200.000,00
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	101.200.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	175.590.000,00
Belanja Transportasi Peserta	139.590.000,00
Belanja Akomodasi Peserta	36.000.000,00

 Belanja Modal sebesar Rp. 570.990.944,- digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana BPSDM Provinsi Jambi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kediklatan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	37.914.574,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	37.914.574,00
Belanja Modal	333.798.370,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	29.920.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	29.920.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.700.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	35.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.700.000,00



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 224.178.370,00

Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 184.382.120,00

Pengadaan Komputer Unit Jaringan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 10.000.000,00

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 29.796.250,00

Pengadaan Peralatan Jaringan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 199.278.000,00

Belanja Modal 199.278.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Tempat Kerja

199.278.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 199.278.000,00

II. NERACA

Neraca Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2020 terdiri dari :

a) ASET LANCAR

Persediaan

Persediaan sebagaimana tercantum didalam Neraca Tahun 2020 merupakan persediaan Alat Tulis Kantor dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	ATK	-	Rp -
2	Bahan Kebersihan	-	Rp -
3	Obat-obatan	-	Rp -
4	Bibit	-	Rp -
4	Cetak	-	Rp -
5	Bahan Makanan	-	Rp -
6	Bahan Kimia	-	Rp -
7	Pupuk	-	Rp -
8	Alat Bengkel	-	Rp -
9	Bahan Bangunan	-	Rp -
10	Sandang Pangan	-	Rp -
11	Alkes	-	Rp -
12	Alat Listrik	-	Rp -
13	Aset Yang akan Diserahkan Pada Pihak ke tiga	-	Rp -
	Total	-	Rp -

ASET TETAP



Aset tetap BPSDM terdiri dari Peralatan mesin,gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya,kontruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan.

Peralatan mesin jika dibandingkan Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 227.401.250,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN20192020Peralatan dan Mesin11.985.566.528.0012.212.967.778.00Penambahan peralatan mesin selama tahun 2020 terdiri dari :

N			
0	Nama Barang	Banyaknya	Nilai
1	PC	5 UNIT	
			65.385.000,00
2	Pengadaan	20 UNIT	
	Meja Labor		29.920.000,00
3	Pengadaan LAN		
	Labor Komputer		29.796.250,00
4	Pengadaan	3 unit	
	Kursi Tunggu		9.900.000,00
5	(4 Seater) LAPTOP	1 UNIT	
Э	LAPTOP	I UNII	20.000.000,00
6	Thermometer	20 UNIT	20.000.000,00
	mormonicio	20 01411	2.600.000,00
7	AC Std	1 UNIT	
			25.000.000,00
8	AC 1 PK	1 UNIT	
			3.500.000,00
9	AC 1/2 PK	2 UNIT	
			6.500.000,00
1	WASTAFEL	2 UNIT	4 000 000 00
1	ALUMINIUM WASTAFEL	4 UNIT	4.600.000,00
	GALON	4 UNIT	5.200.000,00
1	TELEVISI	3 UNIT	3.200.000,00
2	I LLL VIOI	0 01411	10.000.000,00
1	POMPA AIR	1 UNIT	
3			10.000.000,00
1	KARPET	16 M2	
4	LABORATORI		5.000.000,00
	UM		
-	KOMPUTER		
	JUMLAH		227.401.250,00



Gedung dan bangunan jika dibandingkan Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 199.278.000,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN 2019 2020

Gedung dan Bangunan 19.315.619.196.00 19.514.897.196,00

1	Rehabilitasi Aula Utama BPSDM Prov.Jambi	49.888.000
2	Penataan Lampu Taman dan Lampu	49.720.000,00
3	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala BPSDM	49.890.000,00
4	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Widyaiswara	49.780.000,00
	JUMLAH	199.278.000,00

URAIAN 2019 2020 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.581.181.100.00 1.581.181.100.00

Jalan, jaringan, irigasi jika dibandingkan Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak mengalami kenaikan /perubahan.

URAIAN 2019 2020 Aset Tetap Lainnya 216.892.341.00 254.806.915,00

Aset tetap lainnya pada Tahun 2020 terjadi penambahan sebesar Rp. 37.914.574,00 terdiri dari pengadaan buku perpustakaan pada BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2020.

URAIAN 2019 2020

Akumulasi Penyusutan (17.153.554.093.46) (18.370.914.576,67)



Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari :

AKUMULASI PENYUSUTAN	_	18.370.914.576,64
AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN		-
MESIN	-	10.418.719.058,13
AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN		
BANGUNAN	-	7.700.436.760,01
AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN		
DAN IRIGASI	-	251.758.758,50
AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		-
LAINNYA	_	

ASET LAINNYA

Aset lainnya pada BPSDM Provinsi Jambi merupakan aset rusak berat akan tetapi belum dilakukan penghapusan.

URAIAN	2019	2020
Aset Lain-lain	25.200.000.00	25.200.000.00

KEWAJIBAN

URAIAN	2019	2020
Utang Belanja	98.997.120.00	107.652.441.00

Utang belanja jasa kantor sebesar Rp.107.652.441,- adalah merupakan utang jasa atas pemakaian Listrik,air,telpon, internet bulan Desember 2020 dan akan dilunasi pada Tahun 2021.

• EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih BPSDM Provinsi Jambi yang bersifat lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan merupakan selisih antara jumlah nilai Aktiva Lancar dengan jumlah nilai Hutang Jangka Pendek.



Jika dibandingkan ekuitas BPSDM tahun 2019 dan 2020 maka terdapat penurunan nilai ekuitas sebesar Rp. 729.0050.059 dengan rincian :

URAIAN 2019 2020

EKUITAS 15.819.336.030.54 15.085.285.971,33



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi.Tugas pokok Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut BPSDM Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi
- 2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- 4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur diprovinsi dan kabupaten/kota.
- 5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
- 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Subbagian umum dan kepegawaian.
 - Subbagian program dan pelaporan dan



- Subbagian keuangan dan aset
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan terdiri dari :
 - Subbidang sertifikasi kompetensi.
 - Subbidang pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi dan
 - Subbidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan kompetensi teknis inti terdiri dari :
 - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan.
 - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar dan
 - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi administrasi perangkat daerah penunjang.
- e. Bidang Pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional terdiri dari :
 - Subbidang pengembangan kompetensi umum jabatan administrasi.
 - Subbidang pengembangan kompetensi pilihan jabatan administrasi dan
 - Subbidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
- f. Bidang Pengembangan kompetensi Manajerial terdiri dari:
 - Subbidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah.
 - Subbidang pengembangan kompetensi jabatan struktural dan
 - Subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan
- g. Unit pelaksana teknis Badan (UPTB) dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional.
 - **VISI:** "Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, integritas, kompetitif dan profesional".

MISI:

1) Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Nabusia Aparatur yang berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas penyelenggaraannya.



2) Meningkatkan sarana dan prasarana Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang memadai, efektif,efisien dan akuntabel.

TUJUAN:

- Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota melalui pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jambi.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan melalui analisis kebutuhan diklat, seleksi peserta, penysunan program, pengkajian kurikulum dan silabi serta peningkatan mutu para widyaiswara.
- Meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur pada semua tingkat eselon.
- 4) Meningkatkan wawasan aparatur dalam pelaksanaan sistem administrasi negara.
- 5) Meningkatkan kualitas aparatur guna memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan dan pelatihan secara teknis fungsional dan manajerial bagi seluruh aparatur sesuai petunjuk yang berlaku.

SASARAN:

- 1) Meningkatnya aparatur yang profesional serta berkemampuan untuk mengemban tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan diklat yang semakin tertib, transparan memenuhi standard mutu yang berlaku.
- 3) Meningkatnya jejaring kerja antar lembaga kediklatan yang semakin kondusif.
- 4) Meningkatnya sarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai.
- 5) Meningkatnya program kediklatan aparatur yang telah terpadu dan berorientasi pada kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi maka pada Tahun 2019 telah dilaksanakan



kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi Jambi baik Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Pendidikan teknis lainnya. Adapun program dan kegiatan Diklat yang telah dilaksankan selama kurun waktu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- I. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KEDIKLATAN terdiri dari :
 - Kegiatan Rapat Koordinasi SDM Aparatur.
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengembangan SDM Aparatur.
 - Penyelenggara seminar/lokakarya/workshop pengembangan program dan kegiatan BPSDM.
- II. PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
 - Focus group discussion LSP PDN
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kab/Kota
 - Pelaksanaan akreditasi Lembaga
 - Diklat Analisis Kebutuhan Sistem Informasi bagi OPD
 - Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
 - Penyusunan Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri/Kurikulum/silabi
 - Money Penyelenggaran Pelatihan

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS INTI:

- Diklat teknis inti pengelolaan keuangan desa.
- Diklat teknis inti kewirausahaan purna bhakti bagi ASN
- Diklat teknis inti pengembangan pariwisata



- Diklat teknis inti penanggulangan bencana
- Diklat teknis inti dasar perencanaan dan penganggaran responsive gender.
- Pendataan kebutuhan pengembangan kompetensi teknis inti
- Diklat teknis inti pengelolaan aset daerah
- Diklat teknis inti manajemen kearsipan
- Diklat teknis inti pemandu wisata
- Diklat teknis sanitasi lingkungan
- Diklat teknis inti penilaian koperasi

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM FUNGSIONAL

- Pelatihan pengembangan kompetensi pengelola perpustakaan bagi guru
 SLTA
- Pelatihan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian
- Pelatihan pengembangan revolusi mental bagi pejabat Eselon IV
- Pelatihan KTI bagi guru SMA dan SMK
- Pelatihan penyusunan DUPAK bagi guru SMA dan SMK
- Pelatihan Pengembangan Organisasi / Budaya Lokal
- Pelatihan Analisis Jabatan bagi ASN
- Pelatihan Pengembangan kompetensi Polisi Pamong Praja

V. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL:

- Diklat Kepemimpinan bagi Jabatan Administrator dan Pengawas
- Diklat Peningkatan Kapasitas Camat
- Diklat Peningkatan Kapasitas Lurah



- Diklat Komunikasi dan Public speaking
- Diklat manajemen Kepemimpinan dan Kecerdasan emosi bagi pejabat Eselon
 III/IV



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020 yang merupakan salah satu jenis Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disamping Neraca, Laporan Operasional,Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Realisasi Anggaran yang kesemuanya merupakan satu kesatuan pelaksanaan APBD selama kurun waktu 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan BPSDM provinsi Jambi Tahun 2020 maka informasi yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- A. Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp. 29.335.000,-
- B. Realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp. 19.327.945.660,00 atau 96.31 % dari anggarannya sebesar Rp. 20.069.443.041,81
- C. Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah Rp. 15.192.938.412,33 atau mengalami penurunan sebesar Rp.778.553.059 dibanding posisi aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp.15.971.491.471,54.
- D. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2020 adalah Rp. 107.652.441 yang merupakan utang belanja jasa kantor.
- E. Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 adalah Rp. 15.192.938.412,33 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 778.553.059,- dibanding posisi ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 15.971.491.471,54



Demikian Laporan Keuangan Badan Pengembanagn SDM Provinsi Jambi Tahun 2020, yang merupakan realisasi atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, baik kelompok Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, asset serta kewajiban.

Dengan laporan keuangan OPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan dan kekayaan BPSDM Provinsi Jambi selama kurun waktu satu tahun anggaran, khususnya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Jambi, 31 Desember 2020 KEPALA BADAN

H.M.ISKANDAR NASUTION, S.H.M.Si

Pembina Utama Madya NIP.196503311994031006